



BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR 948/IV/II/2017 • FEBRUARI 2017



KOMISI III DPR RI TERIMA PERWAKILAN MASSA AKSI DAMAI 212

5 TIMWAS TKI DPR RI KE HONGKONG PASTIKAN PERLINDUNGAN TKI

10 KOMISI V DPR RI TINJAU PEMBANGUNAN BENDUNGAN KARIAN DI LEBAK

GRATIS
TIDAK DIPERJUALBELIKAN



Pimpinan Komisi III DPR RI didampingi sejumlah Anggota DPR RI temui Massa Aksi 212 Jilid II

Komisi III DPR RI Terima Perwakilan Massa Aksi Damai 212

Komisi III DPR RI menerima perwakilan massa aksi damai 212 yang tergabung dalam FUI (Forum Umat Islam) yang tengah berdemo di halaman Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/02).

“Kami baru saja menerima perwakilan dari Forum Umat Islam (FUI) untuk menyerap beberapa aspirasi yang ingin mereka sampaikan. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan FUI, salah satunya adalah tentang pemberhentian Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahja Purnama alias Ahok yang notabene berstatus sebagai tersangka,” ujar Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo yang memimpin pertemuan tersebut.

Pada kesempatan itu Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa segala aspirasi atau tuntutan masyarakat ke DPR RI itu akan diakomodasi oleh DPR RI melalui sebuah mekanisme yang ada. Dimana di DPR RI telah bergulir hak angket dari sejumlah fraksi.

“Ada sembilan puluh Anggota Dewan dari empat fraksi yang sudah menandatangani hak angket, tinggal pengesahannya di DPR RI. Lalu, apakah ini akan berhasil? Tergantung pada peta politik yang ada di DPR RI sendiri,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

Selain itu, perwakilan FUI yang dipimpin Sekjen MUI Muhammad al-Khathat juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya. Diantaranya meminta Komisi III DPR RI yang notabene membidangi masalah hukum untuk mendesak mitra kerjanya, yakni Polri untuk menahan terdakwa kasus penistaan Al Quran, Ahok. Hal ini untuk menghindari terdakwa mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

“Beberapa waktu yang lalu terdakwa, Ahok kembali mengulangi perbuatannya, menghina agama Islam. Dengan masih menggunakan pakaian seragam dinas, PDH, ia mengatakan akan berencana membuat wifi yang akan dinamai dengan Al Maidah, dengan password Kafir sambil tertawa. Hal ini tentu sangat melecehkan dan menghina kami. Jika terdakwa tidak ditahan, kami khawatir umat Islam akan emosi dan malah melakukan tindakan yang tidak diharapkan. Oleh karena itu komisi III untuk mendesak Polri menahan terdakwa Ahok,” papar Al Khathat.

Tuntutan ketiga dan keempat

dalam aksi tersebut adalah meminta Komisi III DPR RI untuk mendesak Polri menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis Islam. Serta menghentikan tindakan represif kepolisian terhadap mahasiswa. Muhammad Al Khathat juga meyakini bahwa aksi FUI ini bukanlah aksi politik, namun murni sebagai tuntutan terhadap kasus penghinaan Al Quran dan agama yang dilakukan oleh Ahok.

Usai menerima perwakilan dari aksi massa FUI, Ketua Komisi III DPR RI, Bamsoet didampingi Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap dan Trimedya Panjaitan, serta beberapa anggota Komisi III DPR RI lainnya, seperti Arsul Sani, Muhammad Syafi'i, Abu Bakar Al Habsyi, Dwi Ria Latifa, Adies Kadir, Riska Mariska, dan Refrizal langsung menemui puluhan ribu massa yang tengah melakukan aksi di halaman gedung DPR RI. Dihadapan puluhan ribu umat Islam yang tergabung dalam FUI, Bamsoet mengatakan komitmennya untuk terus mengawal penegakan hukum yang ada di negeri ini. ■

Ketua DPR RI Apresiasi Aksi Damai 212

Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi umat Islam yang telah menunjukkan bahwa Islam selalu menyampaikan aspirasi secara damai.



Ketua DPR RI Setya Novanto

“Semua tentunya bersyukur bahwa unjuk rasa, aksi damai di depan Gedung DPR RI yang berlangsung hari ini, berjalan lancar, tertib, aman dan damai,” kata Ketua DPR RI Setya Novanto, Hari Selasa, (21/2)

Selain itu, Lanjutnya, perwakilan umat muslim yang berunjuk rasa juga diterima sangat baik oleh DPR RI yang diwakili oleh Komisi III DPR RI. “Seluruh aspirasi mereka, suara mereka, keinginan mereka pasti akan didengarkan kemudian dibahas sebelum ditindak lanjuti oleh DPR RI,” ujarnya.

Menurut Setya, pertemuan perwakilan umat muslim dengan Komisi III DPR RI merupakan tradisi yang sangat baik dan harus dicontoh oleh seluruh Warga Negara Indonesia yang ingin menggunakan haknya dalam hal ini menyampaikan aspirasi dan mengemukakan pendapat di muka umum, meski hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang dan Konstitusi.

“Saya juga turut berbangga bahwa seluruh komponen bangsa telah memahami jika negara kita adalah negara hukum yang menjunjung tinggi serta mengedepankan supremasi hukum dalam penyelesaian sebuah kasus hukum,” ujarnya.

Karena itu, sebaiknya seluruh persoalan yang berkaitan dengan

hukum seharusnya diselesaikan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Tidak justru mencampuradukkannya dengan mekanisme politik, apalagi sampai mempolitisir proses yang sedang berlangsung.

Setya mengatakan, dapat kita lihat dan rasakan saat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang beberapa diantaranya dinilai berbeda cara pandang dengan pengunjuk rasa, namun diterima dan dipersilahkan untuk berbicara ditengah ratusan massa, oleh saudara kita yang berunjuk rasa.

“Para alim ulama, para pemuka agama juga telah menganjurkan hal yang sama untuk sama sama membuktikan bahwa Islam adalah ajaran damai, membawahi rahmat bagi seluruh kalangan, seluruh golongan dan mengayomi perbedaan,” tambahnya.

Setnov juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas keamanan yang bertugas, Polri dan TNI yang sangat baik menjaga berjalannya unjuk rasa yang disuarakan oleh saudara-saudara kita. sehingga aksi berjalan lancar, aman dan damai. “Saya juga melihat Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang ditemani oleh Kapolda Irfan Muhammad Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen Edi Laksmana turun langsung mengamankan aksi damai ini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, dirinya berdoa semoga para demonstran dapat selamat kembali ke tujuan serta Sampaikan salam kepada keluarga di rumah, kepada tetangga dan masyarakat sekitarnya. “Sebagai wakil rakyat, kami akan selalu mendengar dan menerima serta menindak lanjuti seluruh aspirasi rakyat, sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Mari kita hidupkan terus suasana demokrasi ini sebagai kekuatan kita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” terangnya. ■



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Plt. Sekjen DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN)

PIMPINAN PELAKSANA

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Mastur Pratono, Suciati, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Bagus Mudjiharjanto

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan

Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat

Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arinindyia, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha, Runi

Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,

Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI

PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi),

Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

STAFF PRODUKSI

Eko Murdiyanto, Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Mujiono

SIRKULASI

Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan,

Siti Rondiyah, Oji, Lamin, Arif

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Freeport Harus Taat Aturan Pemerintah Indonesia

Pemerintah diberikan kewenangan dan kekuasaan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur, mengurus serta mengelola dan mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Atas dasar itu, amat sangat beralasan DPR RI mendukung langkah pemerintah untuk menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi *Freeport*.

Sikap tegas Pemerintah Indonesia kepada perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini didukung kalangan wakil rakyat. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Agus Hermanto.

"Kalau *Freeport* mau mengekspor konsentrat, tentu harus melalui IUPK, di situ ada juga waktu (5 tahun) tapi harus tepat. Ada divestasi, harus buat smelter dan sebagainya, sehingga tetap kami hargai kontrak, namun tidak boleh abaikan Undang-Undang," kata Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/02).

Menurut Agus, *Freeport* harus taat dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Dia mengatakan, mungkin saja *Freeport* tidak berkenan dengan aturan ini, tapi yang jelas apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Minerba.

"Kalau dengan permen ini, *Freeport* tidak bisa memenuhi persyaratan itu, tentu hal-hal

yang diambil itu merupakan tanggung jawab masing-masing karena memang ini juga merupakan suatu aturan undang-undang yang harus juga kita lakukan kepada seluruh rakyat Indonesia," papar Agus.

Kondisi saat ini *Freeport* menolak dengan tegas aturan yang disodorkan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 seperti keharusan divestasi saham sebesar 51 persen dan ketentuan pajak prevailing.

Selama 120 hari ke depan, *Freeport* dan pemerintah Indonesia masih akan mendiskusikan hal ini. Bila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, *Freeport* berencana menggugat pemerintah Indonesia ke Badan Arbitrase Internasional.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, meminta pemerintah tidak takut menghadapi ancaman Presiden Direktur *Freeport* *McMoran Inc*, Richard C. Adkerson. *Freeport*



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto

berniat menggugat Pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional. Ancaman itu setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil. ■

(ekos) Foto: Andri/k



Timwas TKI DPR RI Ke Hongkong Pastikan Perlindungan TKI

Tim Pengawas TKI DPR RI (Timwas) dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja lapangan ke Hongkong guna menggali informasi mengenai permasalahan TKI yang berada di Hongkong sebagai salah satu masukan dalam menyelesaikan revisi UU Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri yang saat ini sedang dibahas Timwas.

Kami berharap buruh migran Indonesia yang berada di Hongkong dapat memberi masukan mengenai permasalahan yang kerap menimpa sebagian buruh migran, sehingga dengan memetakan secara jelas persoalan maka dapat dibangun sistem perlindungan TKI yang lebih efektif dan berpihak kepada para buruh migran baik dari pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan dalam revisi UU Nomor 39 tahun 2004," terang Fahri di Hongkong, Sabtu (18/2).

Di Hongkong, Timwas langsung mengunjungi shelter-shelter yang selama ini membantu dan memfasilitasi tenaga kerja Indonesia yang mengalami berbagai permasalahan di Hongkong dengan mendengarkan curahan hati para TKI yang berada di sana.

"Setidaknya harus ada kesadaran yang menyeluruh bahwa seluruh pekerja Indonesia di luar negeri khususnya di Hongkong adalah bersaudara dan Konsulat Jenderal RI di Hongkong adalah semacam orang tua, yang mengayomi warga negaranya. Negara, dalam hal ini diwakili Konsulat Jenderal harus tampak tegas dan berwibawa dalam menghadapi atau membela tenaga kerja yang bermasalah di Hongkong," jelasnya.

Himbauan itu menjawab curahan hati dari Herlina TKI asal Bima, Nusa

Tenggara Barat yang sedang terlilit kasus tuduhan pencurian dari majikannya, padahal menurut Herlina ia telah dijebak. Saat ini Herlina tinggal sementara di shelter yang dikelola Yayasan Dompot Dhuafa Hongkong.

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu menilai sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia saat ini belum berjalan secara optimal. Banyaknya agen-agen penempatan TKI di Hongkong yang masih mengabaikan hak-hak TKI dan pelanggaran kontrak merupakan indikasi sistem yang selama ini masih banyak memiliki kekurangan dan belum berpihak kepada para TKI.

"Tentu ini akan menjadi masukan berharga dalam perbaikan sistem dan regulasi dalam revisi UU 39 tahun 2004", imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fahri Hamzah mengatakan bahwa ada tiga hal utama yang diagendakan Timwas. Pertama pertemuan dengan konsorsium asuransi yang menjamin ganti rugi terhadap TKI atas segala kerugian dan musibah. Mereka harus transparan tentang apa saja yang mereka terima dari iuran asuransi yang jumlahnya sekitar Rp300-400 ribu per TKI.

Kedua adalah terkait perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri. Dari data yang dilaporkan BNP2TKI

sebenarnya tenaga dan dana yang ditanggung pemerintah sangat kecil sekali. Timwas TKI ingin memastikan bahwa jumlah bantuan hukum melalui aparat dan dana dapat ditingkatkan.

Ketiga adalah rapat dengan otoritas data dan imigrasi. Sebab salah satu akar masalah manajemen TKI adalah identitas ganda. Perdagangan manusia bermula dari tidak adanya data warga negara yang baku, dan akhirnya warga negara jadi komoditas.

Pada Minggu (19/2), Timwas TKI melakukan pertemuan dengan Pekerja Migran Indonesia di Aula St Paul's Convent School Causeway Bay dan mengunjungi Kawasan Central dan Victoria Park yang merupakan wilayah Favorit para TKI di Hongkong untuk berkumpul di hari libur. Kegiatan Timwas TKI di Hongkong sendiri, saat ini masih berlangsung dan masih cukup banyak melakukan berbagai kegiatan.

Berikut nama nama Timwas TKI DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Ke Hongkong, Fahri Hamzah (Ketua Tim), didampingi Anggota Timwas antara lain Masintion Pasaribu, Andi Fauziah Pujiwatie, John Kenedy Aziz, Elnino M. Husein Mohi, Saleh Partaonan Daulay, Nihayatul Wafiroh, Achmad Zaenuddin, Irma Suryani, Ermalena, Capt. Djoni Rolindawan. ■

(es) Foto: dkkjk



Timwas TKI DPR RI berdialog dengan sejumlah TKI di Hongkong



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana

Pernyataan tersebut mengemuka saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Calon Anggota BPKN di ruang sidang Komisi VI, Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (20/02). Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno ini akan melakukan fit and proper test calon anggota BPKN.

Nantinya setelah terpilih, para Anggota BPKN diharap mampu memberikan kontribusi atau masukan, gagasan dan ide dalam perubahan undang-undang baru yang mengatur lembaga ini.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menyampaikan, "Undang-Undang BPKN tidak

Calon Anggota BPKN Diharap Mampu Mendukung Perubahan Undang-undang

Tugas dan kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinilai sudah tidak lagi mendukung, karena dalam undang-undang tersebut Anggota BPKN tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi, hanya bisa memberikan saran saja, bahkan anggarannya dianggap kecil.

mendukung untuk para anggota ini bisa berdaya. Oleh karena itu kita bicara dengan Menteri Perdagangan, Undang-Undang ini harus diubah atau diganti," pungkasnya.

Sehingga dengan begitu, lanjutnya, tugas dan fungsi Anggota BPKN bisa lebih baik dalam perlindungan konsumen. Azam membandingkan, saat ini BPKN tertinggal dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Azam menyampaikan, target perubahan Undang-Undang masuk dalam Prolegnas 2018, jadi anggota yang terpilih nantinya merupakan anggota masaperalihan.

"Yang mampu melaksanakan amanat Undang-Undang yang akan kita ubah. Sebab undang-undangnya tidak bisa mendukung pekerjaan dia. Jadi

Undang-Undangnya kita ubah, mereka mampu melaksanakan daripada amanat Undang-Undang," jelas Azam.

Azam mengungkapkan, poin krusial yang akan dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang yakni kewenangan Anggota BPKN dalam melakukan eksekusi langsung di lapangan. Selain itu lembaga ini nantinya akan dibentuk secara independen, tidak lagi di bawah Kementerian Perdagangan.

"Harus ada eksekusi nantinya, sebab ini tidak ada kewenangan eksekusi. Jadi hanya saran-saran saja dan anggarannya pun terlalu kecil. Jadi kita harapkan bahwa perlindungan konsumen ini, nantinya tidak di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi badan sendiri itu lebih independen," papar Azam. ■

Foto: Rumiok

Perusahaan Wajib Beri Hak Normatif Pekerja



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf

Perusahaan wajib memberikan hak normatif setiap pekerja. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi usai Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Ketenagakerjaan (Binwasnaker K3), Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direksi PT. Pertamina, Direksi PT. Krakatau Steel, dan Direksi PT. Danamon yang membahas masalah terkait penyelesaian hak-hak normatif dan PHK pekerja.



“Dalam pertemuan tadi, para pekerja meminta pihak perusahaan memberikan hak normatifnya. Kalau melihat dari tuntutan tersebut ada dua hal yang bisa dilihat. Pertama, mereka menuntut hak normatif yang seyogyanya memang perlu diperjuangkan karena itu hak setiap pekerja. Kedua, dari sisi kemanusiaan, karena salah satu dari mereka sudah memperjuangkan untuk mendapatkan hak normatifnya selama berpuluh-puluh tahun,” papar Dede di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/02).

Oleh karena itu, menurutnya harus ada titik temu. Bagaimanapun Indonesia menganut Pancasila yang ada konteks keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu terkait permasalahan pekerja PT. Pertamina di Papua, politisi F-Demokrat itu menjelaskan,

permasalahan itu sudah menjadi permasalahan negara, sebab mereka tidak dipekerjakan lagi setelah perpindahan tangan dari Belanda ke Indonesia yang diwakili PT. Permina.

“Maka kita minta Kemenaker untuk menelusuri kembali permasalahan ini, apakah ada data *valid* atau tidak, jangan sampai ini seperti mengatasnamakan sekian banyak orang tapi tidak ada orangnya, datanya harus jelas,” ungkap Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.

Sedangkan untuk masalah ketenagakerjaan di PT Krakatau Steel (KS). Ia meminta manajemen PT. Krakatau Steel untuk meninjau kembali hal-hal yang menjadi hak normatif pensiunan PT. KS. Sehingga dapat diambil jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan BPJS

Ketenagakerjaan untuk melakukan verifikasi pekerja PT. KS yang dialihkan dari PT. Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, terkait masalah ketenagakerjaan di PT. Danamon, menurut politisi Demokrat ini, Komisi IX DPR RI meminta Dewan Direksi PT. Danamon untuk terus melakukan komunikasi intensif dengan perwakilan serikat pekerja dalam menyelesaikan hak-hak normatif pekerja.

“Komisi IX DPR RI juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk segera menyelesaikan permasalahan pengaduan pekerja melalui Tim kecil yang akan menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada Komisi IX DPR RI, termasuk pengaduan yang telah mendapat keputusan hukum tetap (*inkracht*). Kami akan terus mengawal upaya penyelesaian permasalahan hak-hak normatif pekerja ini,” tegas Dede. ■

(from so) Foto: Rikakuk

Azis Syamsudin Gantikan Kahar Muzakir

Kursi Ketua Badan Anggaran DPR RI kembali mengalami pergantian. Wakil Ketua DPR Fadli Zon (F-Gerindra) melantik Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin, menggantikan Kahar Muzakir. Keduanya berasal dari Fraksi Partai Golkar.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon melantik Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin

“Saya menanyakan paket pimpinan, dalam hal ini Ketua Badan Anggaran dari unsur Fraksi Partai Golkar, semula saudara Kahar Muzakir digantikan saudara Azis Syamsuddin.

Apakah dapat disetujui?” tanya Fadli kepada Anggota Banggar yang hadir di ruang rapat Banggar, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/02).

Jawaban “setuju” pun terdengar dari

seluruh Anggota Banggar yang hadir. Palu pimpinan pun diserahkan Fadli kepada Azis beserta Wakil Ketua Banggar Said Abdullah dan Jazilul Fawaid yang hadir dalam penetapan Pimpinan Banggar tersebut.

Dengan demikian, jelas Fadli, kini susunan Pimpinan Banggar Ketua Banggar dijabat Azis Syamsuddin (F-PG), dengan Wakil Ketua Banggar yakni Said Abdullah (F-PDI Perjuangan), Djoko Udjiyanto (F-PD), Ahmad Riski Sadig (F-PAN) dan Jazilul Fawaid (F-PKB).

Sementara itu, Azis mengaku, dengan dilantiknyanya dirinya menjadi Ketua Banggar DPR RI, ia memohon bantuan dan kerjasama dari seluruh Anggota Banggar. Sebagaimana diketahui, Azis adalah politisi asal dapil Lampung yang juga Anggota Komisi III DPR RI. ■

(st. so) foto: jakatv

Komisi XI Sesalkan Lemahnya Intensitas Komunikasi BSBI

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyesalkan lemahnya intensitas komunikasi yang dilakukan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) kepada Komisi XI yang notabene sebagai pemberi tugas kepada BSBI. Kalau ada telaahan, BSBI hanya menyampaikan tembusan kepada Dewan, tidak memaparkan langkah politik yang seharusnya dilakukan oleh Komisi XI DPR RI daripada waktu sebelumnya.

“Karena selama ini rekomendasi yang diberikan hanya ditembuskan kepada kami, setelah selesai dibicarakan dengan Bank Indonesia. Hal tersebut dianggap telah keluar dari tupoksi awal yang menurut UU, fungsi mereka adalah untuk membantu DPR RI terkait dengan masalah telaahan yang ada di BI. Komunikasi terkait masalah-masalah konkret seharusnya dibicarakan lebih awal. Kalau komunikasinya harmonis, mereka mau membicarakan masalah perpanjangan masa jabatan atau masalah revisi UU tentu kita bisa melihat dari segi urgensi nya disana,” tegas Heri sela-sela rapat dengan pendapat umum Komisi XI dengan calon anggota BSBI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/02).

Ia menjelaskan, BSBI merupakan salah satu lembaga yang dibentuk untuk membantu DPR RI dalam melakukan mediasi ataupun pengawasan kepada Bank Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar independensi Bank Indonesia (BI) lebih nyata.

“Masa jabatan mereka sudah habis pada tahun 2016, tetapi sempat diperpanjang hingga tahun 2017. Pemilihan anggota BSBI saat ini untuk

masa periode 2017-2020, dimana sesuai undang-undang, masa jabatannya adalah 3 tahun,” ucap politisi F-Gerindra tersebut.

Ada 8 orang dari 10 pelamar yang direkomendasikan Presiden untuk mengikuti Fit and Proper test, lanjutnya. Dalam uji kelayakan itu Komisi XI DPR akan menanyakan mengenai langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, agar BI memiliki independensi yang kredibel dan transparan.

“Hari ini kita fit and proper test untuk pejabat yang sudah menduduki masa jabatan ini, ada kurang lebih 118 rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh anggota BSBI yang lama, namun pada kenyataannya ada beberapa yang hanya sebatas diperhatikan dan ada pula beberapa yang ditindaklanjuti. Kami dari Komisi XI RI yang membidangi masalah keuangan dan perbankan menanyakan apa sebenarnya isi rekomendasi tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, bila komunikasi antara BSBI dan Komisi XI RI bisa berjalan harmonis, maka fungsi pengawasan terhadap BI akan lebih nyaman untuk keberlangsungan dari sektor moneter



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

maupun fiskal yang ada di Indonesia.

“Kami berharap BI independen, tidak masuk ke ranah politik. Itulah yang menjadi tugas BSBI sebagai badan supervisi yang seharusnya bisa melihat secara lebih obyektif. Sebelum rekomendasi disampaikan ke BI, harusnya disampaikan dahulu kepada kami, karena BSBI merupakan kepanjangan tangan dari DPR,” mantapnya. ■

(dep.go.id) Foto: Anasulka

Tantowi Terpilih Jadi Dubes RI Untuk New Zealand

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Tantowi Yahya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan segenap Anggota BKSAP DPR RI, atas prakarsa untuk melaksanakan acara pelepasan dirinya dari kursi Dewan, karena terpilih menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk New Zealand (Selandia Baru).



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Tantowi Yahya



“Saya harus menerima kepercayaan dari Presiden Republik Indonesia untuk menjadi wakil beliau, karena Duta Besar menurut Undang-Undang Hubungan Luar Negeri adalah bentuk representasi dari Presiden, Rakyat, dan Negara Indonesia di negara agreditasi,” ucap Tantowi dalam sambutannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/02).

Baginya hal itu adalah bukan tugas mudah, menurutnya menjadi Duta Besar sekaligus Kepala Perwakilan RI di negara agreditasi adalah pengejawantahan dari kiprah dirinya di Komisi I DPR RI selama dua periode.

“Menjadi Dubes sebenarnya melanjutkan apa yang saya jalankan di Komisi I terkhusus fungsi-fungsi

diplomasi selama saya menjadi Anggota dan Pimpinan BKSAP,” ujar politisi Golkar itu.

Tantowi menjelaskan bahwa tugas Duta Besar sebagaimana digariskan oleh Presiden, dapat disarikan menjadi empat bidang yang merupakan program prioritas, yakni : penguatan NKRI, diplomasi ekonomi, penguatan dan pemberdayaan serta perlindungan warga negara Indonesia dan badan usaha Indonesia di luar negeri, dan penguatan diplomasi bilateral, regional, dan dunia.

Dari keempat bidang tersebut, lanjutnya, semua ada kaitannya dengan DPR RI. Penguatan NKRI tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah sendiri apalagi oleh Kepala Perwakilan Duta

Besar, khususnya bila berhadapan dengan negara yang menganut sistem parlementer. Akses masuk eksekutif agak lebih sulit bila dibandingkan dengan akses yang dimiliki oleh anggota parlemen.

“Saya sangat berharap GKSB Indonesia – New Zealand dapat benar-benar dimanfaatkan, karena kita punya permasalahan yaitu mengenai internasionalisasi isu Papua. Penguatan GKSB dalam kaitan Papua adalah sesuatu yang bersifat mutlak. Jadilah tamu saya yang pertama sebelum yang lain datang, sebab New Zealand adalah salah satu negara tercantik di dunia. Tolong do’a kan saya, agar selalu sukses dalam menjalankan tugas,” mantapnya. ■

(dep.ri) Foto: Naeiroj/UK

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Terminal Jatijajar

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mendorong agar pembangunan Terminal Jatijajar yang berlokasi di Kota Depok agar dapat segera dioperasikan. Ia pun meminta kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum serta Pemda setempat untuk dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Demikian disampaikannya disela-sela peninjauan di Terminal Jatijajar, di Kota Depok, Senin, (20/02).

Politisi PKS ini pun tidak ingin Depok menjadi ikon mangkrak, sehingga pembangunan Terminal ini harus dapat direalisasikan agar dapat memberi manfaat bagi warga Depok.

“Jangan sampai Depok yang hanya berjarak sekian kilometer dari Jakarta menjadi ikon mangkrak. Kita berharap Walikota Depok memproses administrasi dari pemkot ke pusat bisa diselesaikan. Kita akan cari cara bagaimana akses ini bisa ditembus dan bisa membantu operasionalisasi terminal tipe A,” jelas Sigit.

Sigit menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat siap menerima limpahan aset yang belum selesai, sebagaimana yang diamanatkan dalam

UU Pemda bahwa terminal tipe A dikelola oleh pemerintah pusat. Ia pun mendorong pada Pemda Depok untuk terus berkoordinasi

Proyek terminal yang menghabiskan anggaran 120 miliar ini pun harus dapat diselesaikan, karena sebagaimana amanat UU Pemda, terminal tipe A dikelola oleh pusat. Meskipun awalnya, Pemda Depok menginginkan pembangunan ini dikelola sendiri. “Tadi mereka menginginkan menyelesaikannya sendiri. Tetapi karena ada amanat UU Pemda yang mengamanatkan terminal tipe A dikelola pusat, maka kita harus siap mengelolanya dan saling koordinasi yang diperlukan,” tegasnya.

Dengan adanya, pembangunan

terminal ini diharapkan akan membuat warga Depok menjadi lebih mudah mendapatkan akses transportasi. Oleh karenanya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah amat diperlukan. “Ini awal koordinasi yg baik. Semoga rakyat bisa merasakan manfaat pemangunan ini lebih cepat,” pungkas Sigit.

Turut serta dalam kunjungan ini yakni Yoseph Umarhadi (F-PDIP), Daniel Mutaqin Syafiudin (F-Golkar), Syahrulan Pua Sawa (F-PAN) dan Mahfudz Abdurahman (F-PKS). Selain itu, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna turut mendampingi Tim Kunspek Komisi V DPR RI saat meninjau Terminal Jatijajar ini. ■

(hs.sc) Foto: Hendra/UK



Tim Kunspek Komisi V DPR meninjau Terminal Jatijajar di Depok

Komisi V DPR RI Tinjau Pembangunan Bendungan Karian di Lebak

Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Bendungan Karian, yang terletak di Kabupaten Lebak, Banten, Senin (20/02). Bendungan Waduk Karian merupakan salah satu bendungan strategis program pemerintah dalam RPJMN 2015-2019.

Ketua Tim Kunspek sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena mengatakan Bendungan Karian merupakan bendungan yang multifungsi karena akan dimanfaatkan sebagai sumber air baku, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan pariwisata.

Ia menyebutkan manfaat Bendungan Karian tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat setempat, tetapi juga menjadi penyangga ibukota untuk memasok kebutuhan air baku di DKI Jakarta, Bogor dan sekitarnya. Sehingga diharapkan Pemerintah dapat memberikan perhatian khusus agar pembangunannya bisa selesai pada 2019 mendatang.

“Pemerintah Pusat harus memperhatikan bendungan ini bagi penyediaan air baku untuk distribusi ke ibukota ke depan. Selain itu, bendungan ini bisa menampung debit air yang cukup besar, sehingga pada saat curah hujan tinggi pun air bisa dapat terlokalisasi,” urai Michael kepada media.

Masih dijelaskannya, saat ini proses pembangunan bendungan yang menggandeng kontraktor Korea Selatan itu baru mencapai 25 persen dan ditargetkan hingga 50 persen pada akhir tahun ini. Mengingat, dana yang



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Bendungan Karian di Banten

dialokasikan cukup besar yakni Rp339 M untuk tahun anggaran 2017.

“Dan harapan kami bahwa dua tahun ke depan, pembangunan bendungan ini selesai dan bisa diresmikan oleh Presiden,” imbuh politisi dari dapil Papua Barat itu.

Lebih lanjut, ia mengatakan nantinya Bendungan Karian akan menampung 209 juta meter kubik air

dan menggenangi lahan seluas 1.740 hektar dengan luas keseluruhan 2.170 hektar. Manfaat lain dari Bendungan Karian yaitu mengairi daerah irigasi Ciujung seluas 22 ribu hektare dan pengendalian banjir dengan kapasitas tampung sebesar 60,8 juta meter kubik. Bendungan ini juga berpotensi menghasilkan tenaga listrik sebesar 1,8 megawatt. ■

(foto: AFP/Amirul)

Komisi V DPR RI Dorong Pembangunan Eksit Jalan Tol di Sragen

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mendorong pembangunan eksit jalan tol di Sragen, Jawa Tengah. Dengan jalan eksit tol Solo-Kertosono itu maka dampak negatif pembangunan jalan tol itu bisa dikurangi dan kegiatan perekonomian di Sragen bisa tumbuh dan berkembang



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis bersama Bupati Sragen



Demikian ditegaskan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis usai memimpin Tim Kunspek ke Kabupaten Sragen, Jateng, Senin (20/02).

Berdasarkan laporan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati pembangunan jalan tol Solo-Mantingan-Ngawi-Kertosono melewati Sragen sepanjang 56,1 km. Beberapa dampak negatif muncul diantaranya kerusakan jalan baik nasional provinsi maupun kabupaten. Selain itu tersendatnya mobilitas barang dan jasa serta kemacetan lalu lintas.

Tim Komisi V DPR RI yang

berkesempatan melihat langsung beberapa ruas jalan juga merasakan parahnya kondisi jalan akibat pengangkutan material untuk pembangunan jalan tol tersebut. Untuk itu Komisi V DPR RI meminta perhatian khusus kepada Pemerintah Pusat khususnya Kementerian PU-PR untuk menganggarkan perbaikan jalan-jalan terdampak pembangunan jalan tol tersebut.

Bahkan Komisi V DPR RI berharap dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Fary Djemy juga dalam kesempatan ini mengharapkan permintaan dibangunnya jalan eksit tol

di Sragen supaya mendapat perhatian khusus.

"Dengan demikian Sragen tidak hanya menerima dampak negatif pembangunan jalan tol tetapi juga mendapatkan dampak positif dengan kegiatan perekonomian yang makin meningkat," katanya.

Selain itu Tim Komisi V DPR RI juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan utara Sungai Bengawan Solo yang kerap tergenang banjir. Pemerintah diminta perhatian khusus untuk mencari jalan keluar sehingga bencana rutin itu tidak terjadi lagi. ■

(mp) Foto: Masaur/ik

Prinsip Kebudayaan Lokal Harus Tertanam Dalam Spirit Olahraga Nasional

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional diselenggarakan dengan prinsip pembudayaan dan olahraga. Namun realitasnya hanya sedikit kajian yang menempatkan olahraga sebagai sebuah bentuk budaya. Prinsip kebudayaan lokal harus tertanam dalam spirit olahraga nasional.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI Teuku Riefky ke Solo, Jawa Tengah saat pertemuan tim dengan Sekretaris Daerah Kota Solo, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rektor Universitas Sebelas Maret, atlet, mantan atlet, dan pelatih di Solo, Jawa Tengah, Minggu (19/02).

Menurut Riefky, prinsip kebudayaan lokal harus tertanam dalam spirit olahraga nasional yang merupakan salah satu yang sering dilakukan sehari-hari yang menjadikan olahraga sebagai suatu kebudayaan dan kebiasaan. "Bahkan bila sudah mengetahui manfaatnya akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan," ujarnya.

Pembudayaan olahraga sendiri, lanjut politisi Demokrat ini, dapat dilakukan di lingkungan keluarga,



Tim Kunspek Komisi X DPR RI berdialog dengan Atlet UNS di Solo

masyarakat, dan juga sekolah.

"Budaya olahraga tentunya tidak muncul begitu saja tetapi harus dilakukan melalui proses pembiayaan dari lingkungan terkecil hingga masyarakat lebih besar," ungkap Ketua Komisi X DPR RI ini.

Lebih lanjut Riefki mengatakan, bahwa untuk mewujudkan pembudayaan olahraga dibutuhkan langkah-langkah inovatif, pertama inovasi olahraga pendidikan dapat dilakukan melalui perbaikan pengembangan kurikulum, media pembelajaran, bahan hajat dan lain sebagainya.

Kedua, inovasi olahraga rekreasi, dapat dilakukan dengan pengembangan olahraga yang bersifat rekreasi, modifikasi olahraga, olahraga tradisional, baik dari alat, aturan ataupun lainnya.

Dan yang ke tiga inovasi olahraga prestasi seperti pengembangan teknik, taktik, sarana atau prasarana penunjang.

Turut serta anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI antara lain Puti Guntur Soekarno Putra, SB. Wiryanti Sukamdani, Ridwan Hisjam, Nuroji, Dewi Coryati. ■

(mi, sep) foto: rum/iv

DPR RI Serap Masukan Prodi DLP di Yogyakarta

Sebagaimana diketahui, rencana pendirian Program Studi Dokter Layanan Primer (Prodi DLP) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Prodi DLP merupakan kelanjutan program profesi dokter dan program *internship* yang setara dengan program dokter spesialis.

Terkait hal tersebut, Tim Kunjungan Spesifik Panja Prodi DLP Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengunjungi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna menyerap masukan terkait Prodi DLP tersebut. Ferdiansyah berharap, pihaknya dapat menerima berbagai masukan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kepada Pemerintah.

“Dari kunjungan spesifik ini, diharapkan kami bisa mendapatkan masukan berupa data-data faktual terkait kondisi, kendala, dan permasalahan pendidikan kedokteran terutama tentang prodi DLP. Selain itu, juga kesiapan sarana dan prasarana perguruan tinggi sebagai penyelenggara program studi DLP,” katanya saat pertemuan dengan Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada, di Yogyakarta, Jumat (17/02).

Dijelaskan politisi Partai Golkar ini, bahwa Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini cukup lama disahkan,

namun setelah sekian tahun PP belum hadir. “Kami mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan hal ini, agar jangan terlalu berlarut. Pemerintah menyanggupi PP Pendidikan Dokter akan selesai awal April,” ujarnya

Dari pertemuan ini, ia berharap dapat memberikan solusi dan rekomendasi kepada pemerintah terkait rencana pendirian prodi DLP ini.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Rektor UGM Dwikorita Karnawati mengatakan, pihaknya menyambut baik kunjungan Panja Prodi DLP Komisi X DPR RI ke UGM. Ia berharap melalui diskusi yang dilakukan bisa diperoleh masukan dan solusi terkait rencana pendirian Program Pendidikan DLP ini.

Dwikorita mengusulkan tentang pengembangan *Academic Health System* (AHS) untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, diperlukan perluasan jaringan AHS, termasuk dengan rumah sakit yang dikelola Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan kedokteran.

“Semakin banyak rumah sakit yang terlibat harapannya bisa meningkatkan kualitas lulusan dokter,” jelasnya.

Sementara itu Dekan Fakultas Kedokteran (FK) UGM Ova Emilia menyatakan dukungannya terkait pendirian Program Pendidikan DLP oleh pemerintah. Menurutnya, dengan pendirian program ini menjadi peluang untuk penguatan sumber daya manusia di bidang layanan primer.

Ova mengatakan bahwa sejak tahun 1970-an FK UGM telah menerapkan pendidikan yang sifatnya layanan masyarakat (*community services*). UGM fokus pada bidang tersebut karena layanan primer masih terpinggirkan. Padahal, layanan primer banyak diakses masyarakat pedesaan.

“Puskesmas seolah sebagai batu loncatan untuk dokter. Lewat program DLP ini tidak hanya memperkuat SDM di layanan primer, tetapi juga di sisi karier,” tuturnya.

Plt. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Ilya Fadjar Maharika



Tim Kunspek Komisi X DPR RI bersama sejumlah Civitas Akademika UGM di Yogyakarta

yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan kesiapan untuk menyelenggarakan Prodi DLP. Menurutnya kompetensi DLP sangat diperlukan ditengah keterbatasan dokter di Indonesia dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Terlebih untuk memenuhi kebutuhan dokter diberbagai wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), bukan di

wilayah perkotaan.

"Harapannya penyelenggaraan prodi ini untuk menyiapkan peserta didik mengabdikan di daerah 3T," ujarnya.

Kunjungan Kerja Spesifik Panja Komisi X DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti antara lain Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, dan Anggota Komisi X DPR RI, diantaranya Dwita Ria Gunadi (F-

Gerindra), Muslim (F-Demokrat), Popong Otje Djunjunan, Mujib Rohmat, Noor Ahmad (F-PG), Irine Yusiana Roba Putri, Sofyan Tan (F-PDI Perjuangan), Yayuk Basuki dan Laila Istianah (F-PAN), Arzeti Bilbina (F-PKB), Mustafa Kamal (F-PKS), Dony Ahmad Munir dan Anas Tahir (F-PPP), Yayuk Sri Rahayuningsih (F-NASDEM), Dadang Rusdiana (F-HANURA). ■

(bela, so) Foto: Achauk

Pembudayaan Olahraga Kekurangan Sarana dan Prasarana

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Achmad Fikri Faqih menyampaikan bahwa pembudayaan olahraga baik itu di masyarakat, kabupaten dan kota serta di pendidikan mengalami masalah yang sama yakni kekurangan sarana dan prasarana olahraga.

“Masalah pembudayaan olahraga masih sama yakni kekurangan sarana dan prasarana olahraga, di tingkat pendidikan seperti UGM saja yang memiliki mahasiswa hingga 60 ribu masih sangat kekurangan sarana dan prasarana olahraga,” ungkap Fikri dalam pertemuan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (18/02)

Lebih lanjut, Fikri berharap pemerintah memiliki perhatian yang lebih untuk memenuhi kekurangan sarana dan prasarana olahraga terutama di tingkat pendidikan, karena sarana dan prasarana sangat menunjang peningkatan atlet-atlet berprestasi.

"Banyak atlet-atlet daerah yang ingin berprestasi namun mereka kekurangan sarana dan prasarana olahraga, sehingga untuk latihan saja mereka mengalami kesulitan," terang Fikri.

Politisi PKS ini menyatakan bahwa masukan-masukan tersebut sangat berharga dan akan menjadi catatan penting bagi pemerintah agar segera melengkapi sarana dan prasarana olahraga jika ingin banyak mencetak atlet berprestasi.

Sementara, Anggota Komisi X DPR RI Anita Yakoba Gah menyampaikan

sangat miris akan keterbatasan tersebut, padahal Yogya memiliki potensi olahraga yang sangat potensial. Lebih lanjut, Anita Yakoba sampaikan akan memperjuangkan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga terutama di Yogyakarta.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengapresiasi program pembinaan olahraga yang dilakukan di kecamatan-kecamatan di Yogyakarta. "Jika pembinaan olahraga ini sudah dilakukan dari kecamatan dengan baik maka bisa menghasilkan atlet-atlet berprestasi yang sangat banyak," ungkapnya.

Sebagaimana paparan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta R. Kadarmanta Baskara Aji mengatakan bahwa selama ini hambatan yang dialami Yogya terutama dalam rangka pengembangan olahraga yakni kekurangan lapangan olahraga.

"Sekarang ini, kami sangat kekurangan lapangan olahraga atau tempat olahraga, karena hampir semua lapangan olahraga yang ada di pinggir jalan menjadi ruko sehingga tempat untuk berolahraga di Yogya sangat kurang," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tanah lapang di Yogya kebanyakan dimiliki oleh warga

sehingga mereka lebih memilih tanahnya digunakan untuk usaha atau dibangun ruko.

Namun, lebih lanjut, ia menegaskan bahwa walapun memiliki kekurangan lapangan olahraga, mereka memaksimalkan lapangan olahraga yang ada dengan melengkapi sarana dan prasarana olahraga di Komplek Stadion Manda Krida. ■

(bela, so) Foto: Singgihuk



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Achmad Fikri Faqih

Legislator Minta Peraturan Kemendagri Tidak Batasi Kontribusi Madrasah Alliyah

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain minta Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang Pemerintah Daerah (Pemda) memberi kontribusi kepada Madrasah Alliyah perlu ditinjau ulang.

“Ini memang menjadi keluhan di daerah lain, maka kita akan minta pemerintah sebaiknya aturan itu tidak membatasi kontribusi Pemerintah Daerah terhadap pendidikan agama terutama Madrasah Alliyah,” katanya usai melakukan peninjauan Tim Komisi VIII ke Madrasah dan Pondok Pesantren Daarul Ilmi di Kalimantan Selatan, Jumat (17/02).

Politisi Partai PKB itu menjelaskan, jika tidak ada kontribusi dari pemda, dana yang diberikan Kementerian Agama kepada Madrasah dan Pondok Pesantren dinilai masih kurang dalam memperbaiki sarana prasarana.

“Apalagi dana yang diberikan Kemenag untuk perbaikan sarpras tidak seimbang dengan jumlah madrasah dan pondok pesantren yang ada di Kalsel. Maka kita akan dorong agar sarpras terus meningkat, sebab cara itu bisa meningkatkan status lembaga

pendidikan islam dan tentu meningkatkan pemberdayaan santri dan siswanya,” ujarnya.

Menurutnya, Komisi VIII telah mendorong anggaran untuk perbaikan sarpras madrasah dan pondok pesantren yang awalnya 600 miliar menjadi 800 miliar. “Anggaran itu kita berikan 59 triliun kepada Kemenag, nah 45 triliun untuk dirjen pendidikan islam, sarprasnya dari 600 kita naikkan menjadi 800 miliar, namun itu untuk seluruh madrasah dan pondok pesantren di seluruh Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah MAN 1 Martapura Nana Mairi berharap Komisi VIII bisa membantu menyelesaikan masalah sarana prasaran di sekolahnya, khususnya masalah saluran air (drainase) yang tidak lancar sehingga terjadi banjir setiap kali hujan.

“Kita harap ini bisa segera diperbaiki, karena ketika air tergenang itu berpotensi timbul penyakit, ini tidak baik untuk anak-anak di sekolah, selain itu yang tidak rusak karena terendam air bisa menjadi rusak, kita harap Komisi VIII DPR RI bisa membantu,” keluh Nana.

Dalam Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kalimantan Selatan tersebut, Abdul Malik Haramain didampingi anggota Komisi VIII DPR RI antara lain Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS), Dwi Astuti Wulandari (F-P Demokrat), Wenny Haryanto (F-Golkar), Muhammad Lutfi (Golkar), Zulfadli (Gokar), An'im Falachuddin Mahrus (F-PKB), Tri Murny (F-Nasdem), Muslich ZA (F-PPP) dan Rahayu Saraswati Dhirakarya Djojohadikusumo (F-Gerindra). ■

(from: as/infokalsel.com)



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau MAN 1 Martapura di Kalimantan Selatan



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau pelaksanaan PKH dan KUBE di Sultra

Pelaksanaan PKH dan KUBE Sering Terkendala Masalah Data

Persoalan yang masih dialami oleh setiap provinsi dan kabupaten terkait Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masalah data. Demikian dikatakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Hamka Haq saat pertemuan dengan masyarakat yang menjadi peserta PKH dan KUBE di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Abeli, Kendari, Sultra, Jum'at (17/02).

“Data yang ada harus di update setiap saat, karena mungkin data yang digunakan selama ini tidak stabil dan selalu berubah. Hal tersebut dikarenakan ada penambahan atau masih ada warga miskin yang belum tercatat, dimana seharusnya mereka masuk ke dalam data Program Keluarga Harapan,” ujar Hamka Haq.

Meski demikian, Hamka menilai pelaksanaan program-program bentukan Kementerian Sosial tersebut di Kelurahan Petoaha kecamatan Abeli, Kendari Sultra, berjalan dengan baik.

"Pelaksanaan PKH dan KUBE disini berjalan sesuai harapan, karena para peserta program didampingi oleh pendamping yang cukup berbobot. Program KUBE spesifik berupa keramba ikan masih jarang dilaksanakan ditempat lain dan perlu dikembangkan, karena keramba ikan ini lebih langsung bisa dinikmati hasilnya. Produksinya juga bisa terpasarkan dengan baik dibandingkan dengan berusaha di bidang kerajinan," paparnya.

Menurutnya, kalau menjual ikan

setiap hari hasilnya lebih laku, apalagi di Kota Kendari banyak orang yang mengkonsumsinya.

"Kami berharap program KUBE dapat lebih dikembangkan lagi dari segi penambahan modalnya. Kementerian Sosial juga harus melihat prospek pemasarannya, sebab KUBE keramba ikan pemasarannya tidak terlalu sulit. Selain itu, untuk pendamping PKH harus bisa bekerjasama dengan Lurah dan Camat setempat, guna mendata warga miskin yang belum masuk Program Keluarga Harapan," pungkasnya. ■

(dep. sa) / foto: univ.



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau pelaksanaan Program E-Warong di Medan

Program E-Warong Harus Tepat Sasaran

Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dewan, Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik meninjau pelaksanaan Program e-Warong di Kota Medan.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu saat menggelar pertemuan dengan jajaran Pemkot Medan, Dinas Sosial Provinsi Sumut, Perwakilan Bulog, Perwakilan BRI di Gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Jum'at (17/2)

Dalam sambutannya, Khotibul juga menekankan pentingnya basis data yang akurat, terverifikasi dan tervalidasi dengan baik agar berbagai program yang dicanangkan Kemensos tepat sasaran.

"*Problem* data penerima bantuan seperti PKH (Program Keluarga Harapan) hingga kini masih jadi kendala

utama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial," ungkap Khotibul.

Ia menambahkan bahwa Komisi VIII DPR RI sudah pernah menyetujui anggaran senilai 600 miliar lebih untuk update verifikasi data penerima bantuan sosial, namun temuan di lapangan ternyata Kemensos masih juga menggunakan data BPS Tahun 2011.

Terkait Program e-Warong, politisi Demokrat ini juga menyayangkan belum dibuatnya sistem terpadu antara Kemensos, Bulog dan Bank BUMN (BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri) terutama terkait laporan pertanggung jawaban anggaran yang digunakan

dalam Program e-Warong.

"Sepertinya baru sebatas MoU saja, masih ada diskoneksi antara perbankan, Bulog dengan kementerian terkait pertanggung jawaban anggaran sehingga perlu penjelasan secara transparan terkait program e-warong. Karena ini menggunakan APBN," imbuh Umam.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini mengingatkan hal tersebut supaya temuan disclaimer BPK tidak terjadi lagi di Kemensos. Bagaimanapun sebuah program yang baik juga harus didukung oleh sistem pelaporan pertanggungjawaban yang baik pula, pungkasnya. ■



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau MAN 1 Martapura di Kalimantan Selatan

Lulusan Madrasah Aliyah Diupayakan Masuk Birokrasi NKRI

Anggota Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan Muslich mengatakan lulusan madrasah Aliyah yang ada di pondok pesantren harus masuk dalam birokrasi NKRI.

“Lulusan dari sini jangan hanya pandangannya menjadi guru dan bekerja di Kementerian Agama saja, kalau bisa Aliyah masuk dalam birokrasi NKRI,” kata Muslich usai berdialog di Pondok Pesantren Daarul Ilimi, Kalsel, Jumat (17/02).

Apalagi lanjut politisi PPP itu, Kemenag saat ini membuat beasiswa S-1 bagi lulusan Aliyah yang berprestasi.

"Ada program dari Kemenag,

beasiswa S-1 khusus untuk Aliyah di bawah pondok pesantren. Kesempatan ini harus digunakan sebaik mungkin, agar nantinya negeri ini mendapatkan orang yang selain berpendidikan juga ahlaknya baik, imannya baik, soleh/solehah," ujarnya.

Pandangan Kiai, lanjutnya jangan hanya menjadi guru dan bekerja di lingkungan Kemenag saja, Aliyah harus melakukan terobosan di bidang lain,

kalau bisa bahkan lulusan Aliyah dimasukkan bidang akademik kepolisian dengan beasiswa yang diberikan Kemenag.

"Supaya negeri ini menjadi solid, NKRI bisa di pertanggung jawabkan, dengan lulusan Aliyah yang dikuliahan di berbagai bidang itu tadi," harapnya. ■

(mump) Foto: Ria/ik

Praktik Bernegara Harus Sesuai Wasantara



Tim Pansus RUU Wasantara bersama Gubernur Sulut

Inilah yang disampaikan Ketua Tim delegasi Pansus RUU Wasantara Agun Gunanjar di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Senin (20/2). Wasantara yang dimaksud Agun adalah mampu memahami dan menjaga keragaman rakyat Indonesia yang sangat kaya. Adat istiadat, ras, bahasa, hingga busana masyarakat Indonesia beragam. Inilah yang perlu dijaga dengan UU Wasantara.

"Indonesia punya karaktetistik

juga kepulauannya sangat luas dengan ribuan pulau. Bahkan, sebagian pulaunya belum berpenghuni," jelas Agun dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambe. RUU usul inisiatif DPD RI ini, ingin agar pemerintah pusat dan daerah tidak mengambil kebijakan berdasarkan ego wilayah.

Ditambahkan Anggota F-PG ini, kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Indonesia juga harus

Para penyelenggara negara harus memahami betul pandangan wawasan nusantara (wasantara) yang sangat strategis.

Praktik bernegara memang harus disesuaikan dengan wasantara. Untuk itu, pengambilan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah mesti pula berwawasan nusantara.

terjaga, karena bisa menjadi perekat kebangsaan. Di sinilah UU Wasantara perlu hadir mengatur kehidupan dan kearifan bangsa Indonesia. Pembangunan hukum, sosial, dan ekonomi kelak akan merujuk pada UU Wasantara.

Sementara itu, Gubernur Sulut berkomentar, ada banyak masukan yang bisa digali dari Sulut. Di sini ada banyak suku dan pulau. Sebagian pulaunya belum berpenghuni. Dan RUU Wasantara yang sedang dirumuskan ini harus pula menjangkau masyarakat di Pulau Miyangas yang berbatasan langsung dengan Philipina. Masyarakat di sana punya kekhasan sendiri sebagai entitas khusus dan unik. ■

■

(mh.se) Foto: Huseinika

Komisi II DPR RI Minta Pemerintah Perhatikan Tenaga Honorer



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Reza Patria bersama Komisioner ASN Waluyo dalam forum legislasi

Pemerintah diminta untuk memperhatikan tenaga honorer yang sudah bekerja lama atau yang diangkat sebelum tahun 2015 menjadi prioritas.

Baik sebagai guru maupun tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi, dana yang dibutuhkan untuk 430 ribu tenaga honorer tersebut sekitar Rp 23 triliun.



Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Reza Patria dalam forum legislasi 'Politiskah RUU ASN' bersama Komisioner ASN Waluyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/02).

"Pemerintah saat ini memang menghadapi kesulitan keuangan. Karena itu meski Presiden Jokowi pernah berjanji akan mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS), tapi sampai hari ini belum ada yang diangkat jadi PNS. Disamping birokrasi yang harus dibenahi," tegas Reza.

Selama 10 tahun pemerintahannya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengangkat 10.000-an PNS, sesuai dengan janji kampanyenya. Sementara

itu Presiden Jokowi juga akan mengangkat seluruh honorer dan sekretaris desa, tapi persoalannya negara sedang sulit keuangan. "Sedangkan jumlah PNS saat ini sudah mencapai 4,5 juta orang," ujarnya.

Bahkan kata Reza Patria, daerah otonomi baru (DOB) dibatalkan karena kesulitan keuangan tersebut.

Menurutnya, tenaga honorer itu baik-baik dan selama mereka bekerja, berarti dibutuhkan. "Mereka pun masih digaji antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. Karena itu sebaiknya diangkat dulu sebagai status PNS, soal gaji bisa bertahap. Bahwa yang dibutuhkan mereka adalah status. Lalu, apakah Revisi UU ASN ini politis atau tidak, wartawan sendiri yang bisa menilai,"

pungkasnya.

Sementara itu, Waluyo menjelaskan jika pengangkatan PNS itu perlu menimbang kekuatan pemerintah.

Dimana tingkat daya saing negara ini masih di 41, indeks korupsinya di peringkat 36, efek pemerintah di peringkat 46, dan untuk bisnis di urutan ke 91 negara-negara di dunia. "Jadi, birokrasi harus diperbaiki melalui revisi UU ASN ini," jelasnya.

Untuk K2 honorer yang diangkat sebelum tahun 2005, dan K1 yang diangkat sampai tahun 2014. "Mereka sebagai tenaga pengajar dan kesehatan yang baik dan mengabdikan di masyarakat cukup lama, maka sebaiknya diangkat," katanya. ■

(se) Foto: Rumi/ok

BKD Sarankan DPRD Oku Timur Datang Ke Kementerian Keuangan

Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI Asep Ahmad Saifulloh menyarankan kepada Anggota DPRD Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mananyakan langsung ke Kementerian Keuangan RI terkait terlambatnya transfer daerah.

“ Selama ini ada masalah keterlambatan transfer pusat ke daerah, terkait dana bagi hasil,

karena sampai bulan february ini bagi hasil yang bersumber dari APBN 2015 dan 2016 belum cair.

Kami menyarankan, sebaiknya berkonsultasi langsung dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini



Pertemuan BKD DPR RI dengan DPRD Kabupaten Oku Timur Sumsel

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah," paparnya usai menerima kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Oku Timur di Ruang Rapat BKD, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/02).

Biasanya keterlambatan tersebut, kata Asep, karena penerimaan di daerah

sendiri mungkin sampai saat ini masih belum selesai. "Berapa sih sebenarnya realisasi penerimaan di Kabupaten Oku tersebut," ujarnya.

Alasan lain yang menyebabkan keterlambatan, lanjut Asep, juga karena saldo kas daerah masih tinggi, dengan begitu pencairan akan ditunda. "Karena lebih mengutamakan bagi mereka yang mengalami kesulitan di dalam *cash flow*. Yang ketiga bisa bersumber karena pemerintah ini masih kekurangan penerimaan," jelas Asep.

Namun, lanjutnya, dari pihak DPRD

Kabupaten Oku Timur mengklarifikasi bahwa kriteria di atas tidak terpenuhi. "Maka ini jadi pertanyaan besar, sebenarnya yang mengetahui duduk permasalahannya ada di Kementerian Keuangan. Bisa jadi, kita melihat, sebagai analis dari luar, memang ada persoalan di pemerintah pusat. Terutama di awal-awal tahun anggaran, bisa saja sumber-sumber keuangan pemerintah pusat masih terbatas. Jadi belum bisa memenuhi kebutuhan transfer daerah," ungkap Asep.

Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah tetap mengutamakan kejujuran dalam menyajikan data-data. Karena data-data itu akan berpengaruh pada formulasi perhitungan transfer pemerintah pusat ke daerah. Selain itu juga senantiasa memperbaiki tata kelola keuangan APBD, dengan begitu akan diberi kepercayaan mengelola anggaran oleh pemerintah pusat. ■

(ke.sci) Foto: Ajayadi/UK

Penyusunan Buku Pendidikan Anak Harus Menjunjung Nilai Budaya Indonesia



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

Menanggapi buku yang mengandung pendidikan seks untuk anak terbitan Tiga Serangkai itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menilai, mungkin

penulisan dan penyusunan buku itu didasari niat baik untuk memberikan bantuan pada orangtua terkait pendidikan seksual.

"Namun, materi pendidikan seks

Potongan halaman buku cerita berjudul 'Cerita Aku Belajar Mengendalikan Diri' dalam seri 'Aku Bisa Melindungi Diri' yang dinilai mengandung konten dewasa, marak beredar di tengah masyarakat pada Senin (20/02). Dalam beberapa cuplikan halaman buku itu, terlihat ilustrasi anak kecil tengah berbaring sembari memeluk guling dan menceritakan pengalaman yang dianggap tak pantas untuk dikonsumsi anak-anak.

sejak dini kepada anak harus didukung juga oleh segi kepastian publikasinya dari sisi nilai-nilai budaya yang dijunjung masyarakat Indonesia," kata Sutan, saat dihubungi Parleментарia



melalui sambungan telepon, Selasa (21/02).

Sutan memaparkan, terkait sisi materi, penyusunan dan penulisan buku pendidikan seks seharusnya melibatkan minimal tiga keahlian, yaitu pedagogi (pendidikan), psikologi, dan ahli kesehatan. Bahkan jika diperlukan bisa melibatkan ahli teologi untuk melihat bagaimana pandangan masing-masing agama terkait materi buku.

“Sisi penggunaan bahasa juga memegang peran penting, karena jika disusun dengan tata bahasa yang sepotong-potong atau parsial justru akan menimbulkan pemahaman yang salah di masyarakat,” imbuh Sutan.

Menurut Sutan, editorial penerbit menjadi kunci untuk menimbang kembali penyajian buku dari sisi kebahasaan, visualisasi, dan dampak jika buku tidak dibaca secara utuh. Buku-buku yang memuat pendidikan seks perlu mencantumkan jenjang usia peruntukan buku dan peringatan bagi orangtua yang mendampingi untuk membaca (disclaimer).

“Hal-hal yang menjadi panduan harus sudah tercantum di dalam sampul buku. Buku-buku dengan konten sensitif seperti ini dapat terlebih dahulu diujicobakan pada lingkup terbatas untuk mendapatkan respons dari pengguna buku, termasuk orangtua dan guru,” imbuh Sutan.

Namun di satu sisi, politisi F-Gerindra itu mengapresiasi respons cepat dari penulis yang melakukan klarifikasi dan juga penerbit yang menarik buku dari peredaran perlu dihargai sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Walaupun demikian, penulis dan penerbit sebaiknya secara bersama-sama memberikan klarifikasi atau juga permohonan maaf sehingga tidak terlihat bertindak masing-masing sebagai pembelaan diri.

“Dengan demikian, masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan latar belakang penerbitan buku tersebut dan upaya-upaya penulis-penerbit mengatasi krisis tersebut. Semoga hal ini menjadi pembelajaran untuk ke depannya,” dorong Sutan.

Peristiwa demi peristiwa kurang baik yang terus terjadi dalam dunia perbukuan Indonesia, seharusnya memberikan pelajaran bahwa persoalan buku harus didukung sebuah sistem yang menggerakkan ekosistem perbukuan ke arah positif serta berkelanjutan. Pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus turun tangan dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan para pelaku perbukuan, termasuk penerbit.

“Karena itu, UU Sistem Perbukuan sudah mendesak untuk diundangkan dan diterapkan di semua jenis buku seperti juga yang disuarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait dengan buku tersebut,” jelas Sutan, yang juga merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk).

Untuk itu, sebuah lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terkait dengan dunia perbukuan juga perlu segera dibentuk sebagai amanat yang tercantum di dalam RUU Sistem Perbukuan. Pemerintah dapat didorong menyusun dan menerbitkan buku nonteks terkait pendidikan seks untuk anak sejak dini sehingga dapat menjadi buku acuan dan contoh bagi para penulis serta penerbit di Indonesia.

“Dengan demikian, sebuah buku pendidikan seks untuk anak usia dini tidak semata-merta dapat diterbitkan dengan alasan kreativitas, terobosan, ataupun sebuah fenomena modernitas tanpa mempertimbangkan banyak hal,” tutup politisi asal dapil Jambi itu sembari mengatakan bahwa saat ini RUU Sisbuk sedang menjalani uji publik di Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Sementara itu, dalam laman Facebook-nya, Penerbit Tiga Serangkai menyatakan, buku cerita berjudul *Aku Belajar Mengendalikan Diri* dalam Seri *Aku Bisa Melindungi Diri*, bahwa pihaknya berkeinginan membantu orang tua menjelaskan pada anak-anak tentang pentingnya melindungi diri dari orang-orang yang berniat tidak terpuji terhadap mereka, membekali anak cara

melindungi diri dari ancaman penyakit dan kejahatan seksual, juga pengetahuan dasar seksual yang penting untuk diketahui anak sejak dini.

Penerbit mengangkat materi “masturbasi” dalam salah satu cerita karena berawal dari adanya fenomena anak yang mendapatkan keasyikan saat menyentuh, memegang, atau bahkan memainkan kemaluannya. Hal “negatif” ini sudah umum dijumpai. Beberapa orang menamakan aktivitas memainkan kemaluan ini dengan sebutan masturbasi. Sebenarnya, perilaku pada anak tersebut belumlah layak disebut masturbasi karena makna masturbasi adalah proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin atau stimulasi organ seks oleh diri sendiri.

Dengan latar belakang tersebut, buku ini berfungsi sebagai media untuk menyampaikan kepada anak bahwa perbuatan tersebut, memainkan kemaluannya, tidak sepatutnya dilakukan dan memiliki risiko kesehatan. Tentu target buku ini lebih diutamakan kepada para orang tua yang merasa anaknya juga melakukan hal tersebut. Namun, tetap ada baiknya jika buku ini juga dibaca oleh orang tua dan anak pada umumnya sebagai pengetahuan yang bermanfaat sebagai bentuk upaya pencegahan.

Namun penerbit melihat bahwa sebagian masyarakat mungkin belum siap untuk menerima pendidikan seksual sejak usia dini. Untuk itu, sebagai bentuk tanggung jawab, buku tersebut sudah ditarik dari peredarannya dari toko buku umum sejak Desember 2016, tak lama setelah buku itu terbit. Namun sayang, ternyata masih ada yang menjualnya di toko online.

Di sisi lain, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrurun Ni'am mendorong DPR dan Presiden Joko Widodo merealisasikan Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional. Asrurun berpendapat regulasi tersebut dapat menjamin kualitas buku-buku yang beredar di pasaran. ■

Irtama Tekadkan DPR RI Menjadi Wilayah Bebas Korupsi

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI bertekad membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Sejak direncanakan 2 November 2015, berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan profesional. Hal tersebut disampaikan Inspektur Utama Setyanta Nugraha saat menjadi salah satu narasumber dalam Forum Group Discussion dengan tema "Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/02)



Inspektur Utama Setyanta Nugraha

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Utama Setyanta Nugraha menjelaskan FGD menjadi sarana bagi pegawai di DPR untuk membuka ruang diskusi terkait zona integritas. "Bagi teman-teman bisa respon untuk diskusi dan menanyakan. Kita buka ruang untuk diskusi," jelasnya.

Dalam paparannya, Setyanta menyampaikan beberapa hal terkait

pembangunan zona integritas di DPR RI. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi yang memiliki komitmen dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi. "Melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik," tegasnya.

Tujuan dari pembangunan zona integritas adalah mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen

SDM dan penguatan kualitas pelayanan publik. Keduanya harus dapat diwujudkan untuk menjadi instansi yang kredibel.

Oleh karena pentingnya membangun birokrasi yang kredibel, Setyanta pun mengingatkan kepada para hadirin untuk tidak melakukan tindakan koruptif. Ia pun juga mengingatkan untuk tidak menerima gratifikasi terkait pekerjaan yang dilakukan. "Siapapun tidak boleh menerima apapun terkait pekerjaan kita. Kalau kita menerima maka kita harus laporkan ke KPK. Nanti akan dinilai KPK. Jika KPK tidak menyatakan gratifikasi, maka barang itu akan jadi milik penerima," jelasnya.

Dengan adanya FGD ini, diharapkan menjadi sarana menambah pengetahuan bagi peserta yang hadir. Dan upaya untuk membangun lembaga DPR RI yang transparan dan akuntabel dapat diwujudkan melalui pembangunan zona integritas. ■

(file: s01/foto: anar/jk)

BANGKIT! LAWAN KORUPSI! SEKARANG JUGA!



Hambat Investasi, Gubernur Kepri Diminta Laporkan Presiden Soal Hutan Lindung

Tim Kunspek Komisi IV DPR RI dipimpin Ketua Komisi Edhy Prabowo menyarankan Gubernur Prov. Kepri Nurdin Basirun melaporkan persoalan hutan lindung dan hutan konservasi di Kepri kepada Presiden Republik Indonesia. Karena persoalan ini sudah menghambat pembangunan dan investasi.

Hal tersebut disampaikan Tim Kunker Panja RTRW dalam pertemuannya dengan Gubernur dan jajaran FKPD, Kepala BP Otorita Batam, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kehutanan se-Provinsi Kepri, Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dan Tim Terpadu RTRW Kepri di Gedung Graha Kepri. Selasa (21/02).

Persoalan alih fungsi hutan lindung dan hutan konservasi di Kepri bukanlah persoalan mudah, begitu juga dengan daerah lainnya di Indonesia. Karena berhubungan dengan berbagai pertimbangan dari Menteri Kehutanan sebagai pemangku kepentingan. "Tetapi jika menghambat pembangunan, kami sarankan Gubernur melaporkan kondisi lapangan ini ke Presiden," ujar Darori Wono Dipuro Anggota Dewan dari Fraksi Partai Gerindra yang juga mantan Pejabat di Kementerian Kehutanan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Prov. Kepri Nurdin Basirun menyampaikan ke Tim Panja RTRW agar proses pembahasan perubahan peruntukan kawasan hutan Dampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis (DPCLS) dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Gubernur juga meminta Komisi IV DPR RI sesuai kewenangan wilayah kawasan perdagangan nya memberikan rekomendasi (persetujuan) terhadap usulan perubahan kawasan hutan DPCLS seperti yang disampaikan

Menteri Kehutanan.

"Usulan DPCLS Prov. Kepri bila disetujui DPR RI dengan bentuk rekomendasi, tentu memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Kepri terutama di kawasan strategis nasional khususnya kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Kepri ini luas tetapi daratannya tinggal sedikit. Bila mau dioptimalkan pembangunannya terkendala aturan hutan lindung," tegas Nurdin.

Menurutnya, untuk Kabupaten Karimun ada tiga wilayah yang diusulkan untuk direkomendasikan Komisi IV DPR RI, yakni Pulau Anak Karimun yang masuk wilayah kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ). Sementara untuk

Kabupaten Natuna, Gubernur minta kawasan yang telah dipakai oleh Pertamina dan Pelabuhan PT. Pelni serta kawasan Gunung Ranai seluas 26,79 Ha untuk permukiman masyarakat.

Sedangkan di Batam kawasan Rempang Galang (Relang) yang saat ini masih status quo. Padahal kawasan tersebut sangat diminati investor untuk pengembangan kawasan pariwisata terpadu. "Begitu juga dengan Pulau Bintan, banyak rencana pembangunan disana yang masuk kawasan hutan lindung sehingga pembangunannya tidak bisa diselesaikan dengan baik karena terbentur dengan Undang-undang," ungkap Nurdin. ■

(hindi) foto: eka hindra/htr



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau lahan hutan lindung di Rempang Galang (Relang)



Tim Kunspek Komisi X DPR RI mengunjungi para atlet di Universitas Sebelas Maret Solo, Jateng, Minggu (19/2). Foto: Runi

Pertemuan Tim Pansus RUU Wasantara dengan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey untuk mendapatkan masukan dalam merumuskan UU di Manado, Senin (20/2). Foto: Husen



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dipimpin Khatibul Umam Wiranu meninjau pelaksanaan program E-Warung di Kota Medan, Jum'at (17/2). Foto: Naefuroji